

Studi Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia

¹Ahlunnaza Pandu Rahardjo, ²Nia Kurniasari

^{1,2}Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹sid_pandu@yahoo.com, ²nia_kurniasari92@yahoo.com

Abstract. This study is intended to determine how the rural development planning process in Indonesia dan Malaysia. This study used qualitative research methods with a qualitative descriptive design format to describe the condition of the various phenomena that exist in the community that the object of research, and pull it to the surface of reality as a feature, character, nature, model or description of the condition or phenomenon particular. Data was collected through structured and in-depth interviews, and studies in the literature that focused on the exploration of related literature. Data analysis is done by using the method of triangulation and interpretative. Triangulation method rests on the validity of the findings and the level of confidence. Data analysis is inductive, meaning is the result of research rather than generalizations. The results of this research can be used as a model for the analysis of policy makers both at the central and regional governments.

Keywords: Planning Process, Rural Planning, Policy Of Rural Development Planning

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun mendalam (in-depth interview), dan studi literatur yang di fokuskan pada eksplorasi berbagai literatur terkait. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi dan interpretatif. Metode triangulasi berpijak pada validitas temuan-temuan dan tingkat kepercayaan. Analisa data bersifat induktif, hasil dari penelitian bersifat makna daripada generalisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model analisis bagi para pengambil kebijakan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah

Kata Kunci : Proses Perencanaan, Perencanaan Perdesaan, Kebijakan Pembangunan Perencanaan Perdesaan

A. Latar Belakang

Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011), perencanaan pembangunan yang dilakukan manusia pada awalnya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin maju suatu peradaban dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia akan mendorong umat manusia menggunakan kecerdasannya untuk melakukan upaya pembangunan tertentu guna pemenuhan kebutuhannya. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.

Wilayah Indonesia dari segi luasan kawasan masih didominasi oleh luasan kawasan perdesaan (*rural*) dibanding kawasan perkotaan (*urban*). Fungsi kawasan perdesaan (*rural*) bagi pembangunan nasional maupun regional tidak kalah pentingnya dibandingkan kawasan perkotaan dan metropolitan. Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri dan akan terkait dengan pengembangan wilayah yang lebih luas. Suatu wilayah bisa disebut kawasan perdesaan karena

mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan kawasan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan. Namun dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan.

Di Malaysia pada tahap awal setelah kemerdekaan, terlihat beberapa masalah umum perekonomian yang dihadapi oleh perdesaan Malaysia, seperti angka kemiskinan, kurangnya akses ke infrastruktur dasar, kesehatan yang buruk dan pendidikan. Di balik kejadian ini, ada variasi kondisi pedesaan seperti sumber daya, sosial budaya, politik dan ekologi memiliki pengaturan fisik yang berbeda masing-masingnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pedesaan sering diabaikan karena banyaknya keragaman konteks pedesaan.

Sedangkan untuk isu pembangunan pedesaan dan tantangan Malaysia (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) diantaranya : Mencapai keseimbangan optimal antara pembangunan perkotaan dan pedesaan, memastikan pertanian tetap kompetitif dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi, memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga, mengurangi keberlanjutan kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan relatif, perubahan pola pikir rakyat pedesaan, berkurangnya nilai pedesaan, kurangnya kepemimpinan desa, ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah, kesempatan kerja yang tidak menarik, terbatasnya peluang dalam bidang wirausaha, kurangnya prospek pasar dan keterampilan pemasaran, permasalahan tanah, rendahnya nilai tambah suatu produk, ketergantungan pada tenaga kerja asing, rendahnya produktivitas, rendahnya penyebaran pemukiman perdesaan, dan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan.

Kondisi saat itu memaksa harus menyikapi pembangunan daerah pedesaan yang berkaitan dengan kondisi awal di bawah-pengembangan sektor tradisional khususnya sektor pertanian yang pada dasarnya diabaikan selama pemerintahan kolonial. Selain itu, agenda untuk pengembangan budaya Melayu yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar dan kompromi yang disepakati antara Melayu dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu perlindungan "Hak Istimewa Orang Melayu".

Indonesia merupakan negara berbasis desa, sebab 82,3% wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan. Jumlah desa di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 72.944 desa (Permendagri 18 Tahun 2013). Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan wilayah perkotaan yang sangat pesat menimbulkan isu signifikan yang ikut berpengaruh dalam pengembangan kawasan perdesaan. Isu-isu strategis pembangunan desa di Indonesia (Kementerian Badan Perencanaan Nasional) diantaranya adalah :

- a. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa ; Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum

- b. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan
- c. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa
- d. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup
- e. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota.

Sehingga untuk menjawab isu permasalahan pengembangan kawasan perdesaan tersebut, diamantakan dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan pula tentang arahan bagi penataan ruang kawasan perdesaan, yaitu: pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Dari permasalahan dan isu di Malaysia dan Indonesia yang telah dijelaskan, maka dari itu perlu adanya penelitian “**Studi Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia**”

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Proses teknis kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia dalam pembangunan kawasan perdesaan, tidak seimbang sebagaimana selama ini terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan di perdesaan. Persoalan yang dihadapi wilayah desa dan kota adalah masalah-masalah yang spesifik, sebab masing-masing wilayah mempunyai potensi yang berlainan. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan adalah menyetarakan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Program-program pembangunan di desa memperhatikan penataan ruang perdesaan dan membangun keterkaitan fungsi-fungsi pemerintahan, permukiman, sosial dan ekonomi. Program-program pembangunan di desa mengembangkan keselarasan antar-desa. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan skala efisiensi dalam pembangunan desa dan perdesaan. Arah pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya **kemandirian dan kesejahteraan**, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas & pendampingan berkelanjutan. Pendefinisian dokumen perencanaan tingkat desa perlu sederhana dan mudah dilaksanakan perangkat desa (RPJM desa- RKP desa- APBDesa)

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu program untuk strategi pemerintah Nasional maupun daerah, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. Bintoro Tjokroamdjojo (1990:12) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai pengarang penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang baik secara lebih efisien dan efektif, sedangkan menurut Albert Waterston dalam

Bintoro menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan. Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas skala kebutuhan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi semua komunitas masyarakat, pemerintah, lingkungan dan wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

3. Participatory Planning

Perencanaan partisipatif adalah model perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan partisipasi warga dengan basis musyawarah. Secara konseptual, model perencanaan ini mengadopsi konsep ‘demokrasi deliberatif’ yang digagas oleh Jurgen Habermas. Model perencanaan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan mengedepankan metode dialog serta tukar pikiran untuk merencanakan proses pembangunan di masyarakat.

4. Participatory Action Research

Participatory Action Research (PAR) adalah suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan orang. Jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi. PAR adalah suatu metoda penelitian dan pengembangan secara partisipasi yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini mengakui bahwa poses perubahan adalah sebuah topik yang dapat diteliti. Penelitiain ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

5. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perdesaan

Proses perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat perdesaan sehingga pembangunan nasional kawasan perdesaan hendaknya merupakan pembangunan perdesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sehingga misi yang di emban yaitu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan. Pembinaan terhadap masyarakat desa dilakukan dengan pendekatan sosial budaya yang mempergunakan sistem sosiasl politik masyarakat setempat untuk berkomunikasi.

6. Pemberdayaan Kelembagaan Yang Terkait Dalam Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Proses perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan kelembagaan di Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Sehingga keterlibatan kelembagaan dalam pembangunan perdesaan memiliki peran yang cukup penting.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga yang baik dan terpadu satu sama lain yang sesuai dengan secara fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Pada kenyataannya kelembagaan yang ada di Indonesia kurang berfungsi dengan baik. Fungsi dan peran yang masih belum optimal, hal tersebut diakibatkan beberapa hal seperti sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya pembinaan kepada pengurus kelembagaan, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan sub bab ini, dijelaskan komparatif penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Indonesia dengan Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) di Malaysia. Proses perencanaan pembangunan perdesaan yang dibandingkan merupakan proses yang digunakan di kedua negara untuk melakukan perencanaan pembangunan desa. Maka dari itu, peneliti mengambil perbandingan antara RPJMDes dan PTD.

1. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Indonesia

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- 1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- 3) Pengkajian keadaan Desa;
- 4) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- 5) Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- 6) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- 7) Penetapan dan perubahan RPJM Desa.



Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015

2. Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia

Pelan tindakan desa merupakan perencanaan strategis yang direncanakan oleh komunitas bagi desa masing-masing. Dalam kata lain, PTD ini adalah umpama Rencana Lima Tahun Malaysia yang menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang setiap desa. PTD disediakan menurut proses perencanaan yang tersedia sebelumnya dan berkaitan kepada kajian-kajian teoritikal dan pengalaman praktis di luar negara termasuk di negara-negara maju.

Proses perencanaan ini kemudian disesuaikan dengan kondisi setempat setelah diuji dalam proyek percontohan di beberapa desa di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pada tahun 2007. Persiapan PTD berporos pendekatan "*participative*" atau keterlibatan turut serta masyarakat setempat. Masyarakat diberikan kesempatan dan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk menentukan program di desa masing-masing disamping berpeluang mengajukan alternatif solusi masalah-masalah yang diidentifikasi di kampung mereka.

Pelan tindakan desa berbasis pendekatan pemberdayaan yaitu melalui lokakarya atau sesi "*brainstorming*". Mereka yang terlibat terdiri dari administrator desa (JKKK), wakil kelompok pemuda, petani, pedagang, pengusaha, guru, profesional, lembaga terlibat. Adapun untuk jumlah peserta yang menyusun pelan tindakan desa ditargetkan tidak melebihi 20 orang.

Penghasilan PTD dipandu "sistem bestari", disusul proses identifikasi masalah dan potensi desa, merumuskan visi dan tujuan pembangunan, menentukan rekomendasi pembangunan, membangun sistem manajemen pengembangan dan pelaksanaan serta pemantauan.



Gambar 3.2 Proses Penyediaan Pelan Tindakan Desa

Sumber : NGAH, I., Pelan Tindakan Desa, 2003

D. Kesimpulan

Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia pada dasarnya masih harus ditingkatkan, karena terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam analisa komparatif yang dilakukan peneliti terhadap proses pembangunan perdesaan yang bisa dijadikan bahan masukan untuk pembangunan perdesaan di Indonesia kedepannya.

Proses perencanaan pembangunan perdesaan di kedua wilayah ini tidak jauh berbeda. Persamaan dan perbedaan yang terbentuk pada dasarnya dapat terlihat dari fenomena yang telah terjadi, sebagai contoh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terhadap desa dan sumberdaya masyarakat perdesaan yang dapat dikatakan masih belum siap untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Bercermin kepada Akta 172 tentang Perancangan Bandar dan Desa 1976, terlihat pemerintah Malaysia dalam mencapai tujuan perdesaannya “Transformasi Perdesaan”, pelan tindakan desa diluncurkan guna tujuan perdesaannya dapat tercapai. Pelan tindakan desa merupakan rencana pembangunan yang diwajibkan ada diseluruh desa Malaysia dan didalamnya menggambarkan rencana jangka menengah dan panjang, dan secara konsisten pemerintah Malaysia mengawal perencanaan pembangunan perdesaannya. Kekonsistenan negara tetangga dalam menerapkan hal ini dapat menjadi cerminan bagi negara Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan ilmu yang selalu harus digali dan dirumuskan lagi, begitu pula dengan proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia ini, setelah diketahui fakta di lapangan, dikaji, dianalisis, maka dalam prosesnya masih harus disempurnakan lagi. Hal ini penting bagi pemerintahan perdesaan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2014. Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan Untuk Pembangunan Perdesaan Mandiri Dan Berkelanjutan. Disampaikan pada : Workshop Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta, Hotel Grand Kemang, Kamis, 3 Juli 2014.
- Ibrahim, N. 2003. Pelan Tindakan Desa. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
- Malaysia, Akta 172 tentang Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
- Ministry Of Rural And Regional Development Malaysia. 2014. Overview Of Rural Development In Malaysia : Towards Sustainable And Resilience Rural Society. Disampaikan pada : Seminar RRRPG Ke-5 di INFRA Malaysia, Agustus 2014.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jawa Barat.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 18 tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta

